

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah sudah harus menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) mulai Tahun 2003. Keputusan ini di perkuat dengan di keluarkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Pada Pasal 233 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang merupakan pedoman pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi; prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas, dimana prosedur akuntansi tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada SKPD dan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Satuan kerja perangkat daerah sebagai entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan

pada entitas pelaporan. Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun laporan keuangannya sebaik mungkin.

Sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan *output* berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan pemerintah daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menuntut adanya pemahaman yang utuh dari pelaksana manajemen keuangan daerah dengan melakukan penyempurnaan secara terus menerus dari instansi terkait, sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Namun, dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sering kali terdapat kendala teknis bagi eksekutif, hal ini menandakan bahwa dalam mengelola keuangan daerah pada masing-masing satuan kerja harus dilakukan secara cermat. Disamping itu, untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang akurat, lengkap, memadai, relevan dan dapat diandalkan dalam bentuk pelaporan keuangan yang

dapat dipahami oleh pengguna, maka harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi itu sendiri.

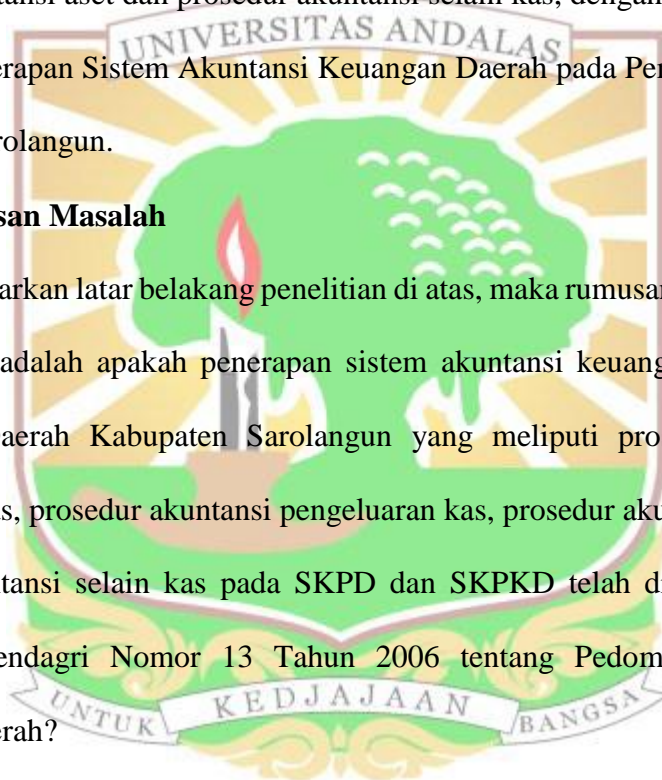
Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD dan SKPKD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, mencakup prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas, dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset serta prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dan SKPKD telah diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan daerah meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset serta prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dan SKPKD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun telah



dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

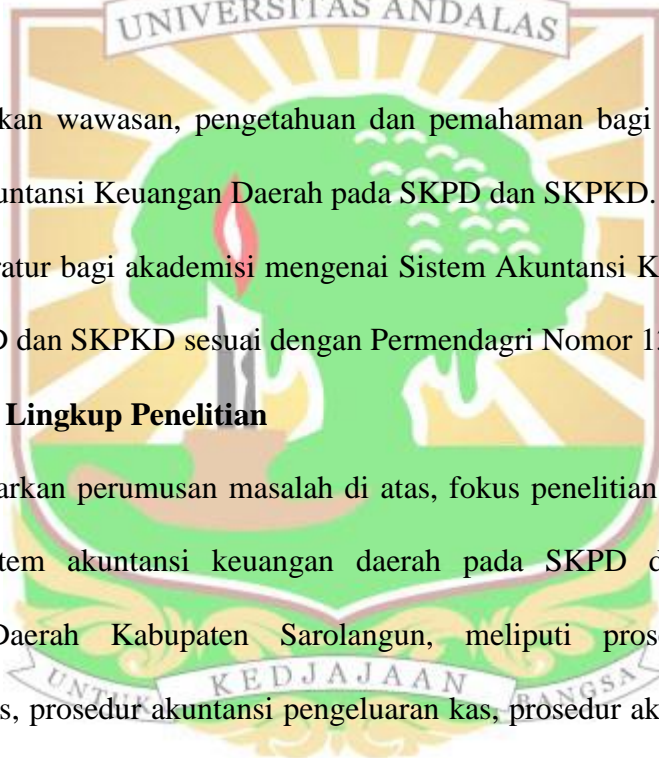
1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat sebagai:

1. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD maupun pada SKPKD.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD dan SKPKD.
3. Bahan literatur bagi akademisi mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD dan SKPKD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, fokus penelitian ini adalah pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD dan SKPKD di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- I. **BAB I PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.
- II. **BAB II LANDASAN TEORI**, menguraikan tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan dari penulisan ini, meliputi sistem akuntansi keuangan daerah, dan review penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran penelitian.
- III. **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, menguraikan desain penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling serta metode analisis.
- IV. **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**, menguraikan tentang gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dan gambaran umum responden serta analisis terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD maupun SKPKD melalui prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset dan prosedur akuntansi selain kas di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pada tahun anggaran 2015.
- V. **BAB V PENUTUP**, memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.